

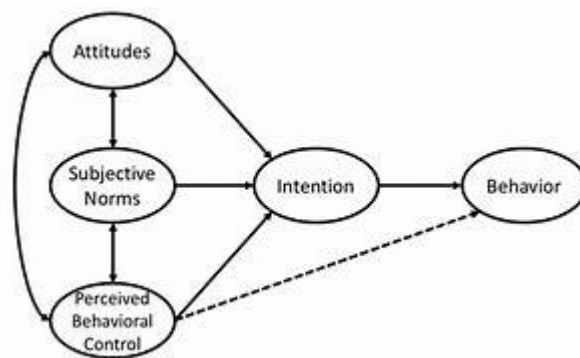
## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori dan Konseptual

Landasan teori, yang dikenal juga sebagai kerangka teoritis atau tinjauan pustaka, adalah representasi dari keseluruhan proses penelitian yang mencakup teori-teori ilmiah yang menjadi pedoman bagi peneliti untuk menjelaskan setiap variabel dan interaksi antar variabel yang sedang diteliti (Iba & Wardhana, 2023). Pada landasan teori, dibagi menjadi tiga kategori yakni *Grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. Pada penelitian ini *Grand theory* yang digunakan adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB), *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) sebagai *middle theory*, dan *Compliance theory* sebagai *applied theory*. Penjelasan dari masing-masing teori tersebut sebagai berikut :

##### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)



Gambar 2. 1 Bagan *Theory of Planned Behavior* (TPB)

*Theory of Planned Behavior* (TPB) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Teori Perilaku Terencana merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1985, 1991), yang menyatakan bahwa niat seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku merupakan penentu paling langsung dari perilaku mereka yang sebenarnya (Ajzen, 1991). Niat ini dipengaruhi oleh beberapa komponen utama, diantaranya :

1. *Attitude toward the behavior* (sikap terhadap perilaku), yakni sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap perilaku yang dimaksud. Hal ini ditentukan oleh keyakinan tentang hasil perilaku dan nilai yang melekat pada hasil tersebut,
2. *Subjective Norms* (Norma-norma subjektif), hal ini mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau menghindari perilaku tertentu. Norma subjektif dibentuk oleh keyakinan normatif. Sebagian besar orang merasa bahwa orang lain yang signifikan menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tersebut
3. *Perceived Behavioral Control*, komponen ini membahas persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku, dengan mempertimbangkan potensi hambatan. Hal ini didasarkan pada keyakinan kontrol, yang mencerminkan adanya faktor-faktor yang dapat difasilitasi atau menghambat perilaku.

Pada aspek sikap terhadap perilaku perpajakan. Kualitas regulasi yang baik akan membentuk persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan, dimana regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami akan menciptakan sikap yang lebih menguntungkan terhadap kewajiban membayar pajak. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi perpajakan dan merasakan keadilan dalam penerapannya, mereka cenderung mengembangkan sikap positif yang mendorong kepatuhan sukarela. Hal ini akan berdampak pada peningkatan realisasi penerimaan pajak karena wajib pajak tidak lagi melihat pajak sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban yang wajar dan bermakna.

Komponen norma subjektif dalam TPB juga terkait dengan penelitian ini, khususnya dalam konteks keamanan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai, termasuk kantor pajak yang mudah diakses, sistem pelayanan yang efisien, dan jaringan komunikasi yang baik, akan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak melihat bahwa pemerintah serius dalam menyediakan fasilitas dan layanan perpajakan yang berkualitas, tekanan sosial untuk patuh akan meningkat. Norma subjektif ini diperkuat ketika

masyarakat melihat bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik dan dana pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mereka nikmati secara langsung.

Aspek kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam TPB memiliki korelasi kuat dengan penggunaan teknologi informasi dalam sistem perpajakan. Implementasi teknologi informasi yang canggih dalam administrasi perpajakan akan meningkatkan persepsi wajib pajak tentang kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sistem *online* dan berbagai aplikasi perpajakan akan membuat wajib pajak merasa memiliki kontrol yang lebih besar terhadap proses pemenuhan kewajiban pajaknya. Mereka dapat mengakses informasi perpajakan kapan saja, melakukan perhitungan pajak dengan lebih mudah, dan menyampaikan laporan pajak tanpa harus menghabiskan waktu dan biaya transportasi ke kantor pajak.

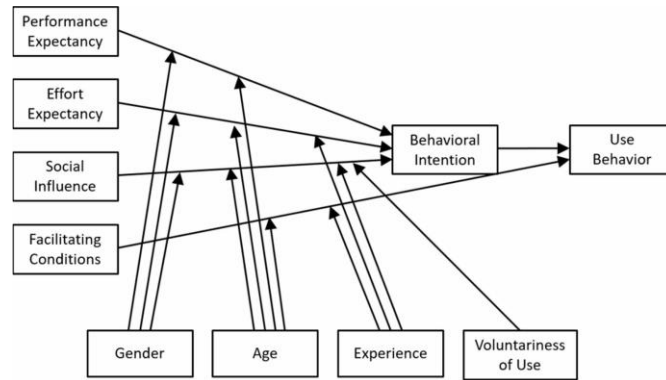
Integrasi ketiga variabel penelitian tersebut dalam kerangka TPB menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN tidak hanya bergantung pada aspek teknis administratif, tetapi juga pada faktor-faktor psikologis dan *behavioral* dari wajib pajak. Kualitas regulasi yang baik akan membentuk sikap positif, kemapanan infrastruktur akan memperkuat norma sosial untuk patuh, dan penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan rasa kontrol wajib pajak terhadap proses perpajakan. Ketika ketiga komponen TPB ini bersinergis positif, intensi untuk patuh pajak akan meningkat, yang akan menghasilkan perilaku kepatuhan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga realisasi penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal di negara-negara ASEAN.

### **2.1.2 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)**

Menurut Alaa M. Momani (2020) Model UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*) adalah teori komprehensif yang dirancang untuk menjelaskan adopsi dan penerimaan teknologi oleh pengguna. Model ini merupakan perkembangan dari teori-teori sebelumnya seperti *Theory Planned Behaviour* (TPB), *Theory of Acceptance Model* (TAM), *Theory of Reasoned Action* (TRA), *The Combination form of TAM and TPB* (C-TAM-TPB), *Model of PC Utilization* (MPCU), *Innovation Diffusion Theory* (IDT), *Motivational Model* (MM), dan *Social Cognitive Theory* (SCT).

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Gambar 2. 2 The UTAUT Model Venkatesh dkk (2003)

Model UTAUT ini dikembangkan oleh Venkatesh dkk. (2003) dengan menggabungkan elemen-elemen dari delapan model utama penerimaan teknologi. Teori ini mengidentifikasi lima determinan inti dari niat perilaku dan perilaku penggunaan, yaitu :

1. *Performance expectancy*, sejauh mana individu percaya bahwa Penggunaan Teknologi Informasi akan meningkatkan kinerja
2. *Effort expectancy*, sejauh mana seseorang menganggap penggunaan teknologi itu mudah
3. *Social influence*, sejauh mana seseorang merasa penting bahwa orang lain dan pengaruh lingkungan sosial menganggap harus menggunakan teknologi informasi
4. *Facilitating conditions*, Ketersediaan infrastruktur dan dukungan menggunakan teknologi informasi , dan
5. *Behavioral intention*, kemungkinan subjektif bahwa individu akan terlibat dalam perilaku yang berikan

Pada dimensi *performance expectancy* dalam UTAUT, yang merujuk pada tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan teknologi akan membantu mencapai kinerja yang lebih baik. Dalam konteks penelitian ini, kualitas regulasi perpajakan yang baik akan meningkatkan *performance expectancy* wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital. Regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai prosedur perpajakan elektronik akan membuat wajib pajak percaya bahwa penggunaan teknologi informasi dalam memenuhi kewajiban pajaknya akan memberikan

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

manfaat yang signifikan, seperti efisiensi waktu, akurasi perhitungan, dan kemudahan dalam pelaporan. Ketika wajib pajak yakin bahwa sistem perpajakan digital akan meningkatkan kinerja mereka dalam memenuhi kewajiban pajak, mereka akan lebih termotivasi untuk menggunakan teknologi tersebut, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan realisasi penerimaan pajak.

Dimensi *effort expectancy* dalam UTAUT, yang mengukur tingkat kemudahan yang diasosiasikan dengan penggunaan teknologi, memiliki hubungan erat dengan keamanan infrastruktur. Infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk jaringan internet yang stabil, server yang handal akan mengurangi *effort expectancy* yang diperlukan untuk menggunakan sistem perpajakan digital. Ketika infrastruktur teknologi berfungsi dengan baik, wajib pajak akan mengalami kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan *online*, proses input data menjadi lebih mudah dilakukan, dan risiko gangguan teknis menjadi minimal. Rendahnya *effort expectancy* ini akan meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk menggunakan sistem perpajakan digital secara konsisten, sehingga partisipasi dalam sistem perpajakan meningkat dan berdampak positif pada realisasi penerimaan pajak.

Komponen *social influence* dalam UTAUT menjelaskan bagaimana persepsi individu tentang kepercayaan orang lain terhadap penggunaan teknologi mempengaruhi intensi mereka untuk menggunakan teknologi tersebut. Dalam konteks perpajakan, kualitas regulasi yang baik akan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung adopsi teknologi perpajakan. Ketika regulasi memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi pengguna sistem digital, kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan elektronik akan meningkat. *Social influence* ini diperkuat ketika pemerintah, institusi keuangan, dan para ahli perpajakan secara konsisten mempromosikan dan merekomendasikan penggunaan sistem perpajakan digital. Pengaruh sosial yang positif ini akan mendorong lebih banyak wajib pajak untuk mengadopsi teknologi perpajakan, yang pada gilirannya

akan meningkatkan basis pajak digital dan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan.

*Facilitating conditions* dalam UTAUT, yang merujuk pada tingkat keyakinan individu bahwa infrastruktur organisasi dan teknis tersedia untuk mendukung penggunaan teknologi, memiliki korelasi langsung dengan kemapanan infrastruktur dalam penelitian ini. Infrastruktur perpajakan yang mapan mencakup tidak hanya aspek teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten, sistem pendukung yang terintegrasi, dan mekanisme bantuan teknis yang responsif. Ketika *facilitating conditions* ini tersedia secara memadai, wajib pajak akan merasa yakin bahwa mereka memiliki dukungan yang diperlukan untuk menggunakan sistem perpajakan digital dengan sukses. Kondisi ini akan mengurangi hambatan teknis dan administratif yang sering menjadi penghambat adopsi teknologi, sehingga penggunaan sistem perpajakan digital menjadi lebih luas dan berkelanjutan.

Integrasi UTAUT dalam penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN melalui penggunaan teknologi informasi tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi itu sendiri, tetapi juga pada ekosistem yang mendukungnya. Kualitas regulasi akan mempengaruhi *performance expectancy* dan *social influence*, sementara kemapanan infrastruktur akan berdampak pada *effort expectancy* dan *facilitating conditions*. Ketika keempat determinan UTAUT ini berinteraksi secara positif dengan ketiga variabel penelitian, akan tercipta sinergi yang optimal untuk adopsi teknologi perpajakan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan *behavioral intention* dan *actual use behavior* terhadap sistem perpajakan digital, yang berkontribusi signifikan pada peningkatan realisasi penerimaan pajak di kawasan ASEAN melalui digitalisasi administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

### 2.1.3 *Compliance Theory*

Teori kepatuhan merupakan teori yang dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 yang menggambarkan suatu kondisi di mana seseorang mampu patuh akan perintah atau aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku yang didasarkan pada kesadaran dan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori kepatuhan, menurut sosiologi dan psikologi merupakan teori yang menekankan proses sosialisasi dalam memengaruhi kepatuhan individu (Cialdini & Goldstein, 2004; Sutinen & Kuperan, 1999)

*Compliance Theory* melihat kepatuhan sebagai hasil dari dua perspektif utama, diantaranya :

1. Perspektif Instrumental, yakni kepatuhan yang didorong oleh pertimbangan untung-rugi, seperti adanya insentif, ancaman sanksi, dan pengawasan dari otoritas pajak
2. Perspektif normatif, yakni kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran moral dan nilai-nilai etika wajib pajak, di mana seseorang merasa bahwa memenuhi aturan merupakan hal yang benar meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadi

Teori kepatuhan dalam konteks perpajakan menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi dua pendekatan utama: pendekatan ekonomi yang menekankan pada *deterrence effect* (efek pencegahan) melalui sanksi dan pengawasan, serta pendekatan psikologi sosial yang fokus pada faktor-faktor non-ekonomi seperti norma sosial, kepercayaan terhadap pemerintah, dan persepsi keadilan sistem perpajakan. Dalam kerangka penelitian ini, ketiga variabel independen tersebut berperan sebagai faktor-faktor yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak melalui mekanisme yang berbeda namun saling melengkapi.

Kualitas regulasi memiliki hubungan yang erat dengan *compliance theory* melalui dimensi kejelasan aturan dan kepastian hukum yang menjadi fondasi

kepatuhan sukarela. Menurut *compliance theory*, wajib pajak akan lebih patuh ketika mereka memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Regulasi perpajakan yang berkualitas tinggi ditandai dengan kejelasan prosedur, konsistensi penerapan, dan kemudahan interpretasi, yang akan mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketika regulasi disusun dengan baik, wajib pajak dapat dengan mudah memahami hak dan kewajibannya, menghitung pajak terutang dengan akurat, dan menghindari pelanggaran yang tidak disengaja. Hal ini sejalan dengan prinsip *compliance theory* yang menyatakan bahwa kepatuhan akan meningkat ketika *cost of compliance* (biaya kepatuhan) rendah dan *benefit of compliance* (manfaat kepatuhan) tinggi, dimana regulasi yang jelas akan mengurangi biaya psikologis dan administratif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kemampuan infrastruktur perpajakan berkaitan erat dengan *compliance theory* melalui konsep kemudahan akses dan kualitas pelayanan yang mempengaruhi motivasi kepatuhan wajib pajak. *Compliance theory* menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan sistem yang mendukung perilaku patuh. Infrastruktur perpajakan yang mapan, mencakup kantor pelayanan yang mudah diakses, sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, dan prosedur pelayanan yang efisien, akan menciptakan *service quality* yang tinggi dalam administrasi perpajakan. Ketika wajib pajak merasakan kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan, mendapatkan informasi yang diperlukan, dan menyelesaikan kewajibannya tanpa hambatan yang berarti, persepsi mereka terhadap sistem perpajakan akan menjadi lebih positif. Hal ini akan meningkatkan *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) karena wajib pajak merasa dihargai dan dilayani dengan baik oleh otoritas perpajakan.

Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan memiliki korelasi yang kuat dengan *compliance theory* melalui mekanisme peningkatan transparansi dan kemudahan yang menjadi faktor kunci dalam mendorong



kepatuhan. Teori kepatuhan modern mengakui bahwa kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Implementasi teknologi informasi akan secara signifikan mengurangi *transaction cost* dan *opportunity cost* yang harus ditanggung wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak tidak lagi perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk datang ke kantor pajak, mengantri, dan mengurus dokumen secara manual. Selain itu, teknologi informasi juga meningkatkan transparansi sistem perpajakan melalui *real-time information*, dan akses informasi yang mudah, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan *trust* dan *confidence* wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

## 2.2 Variabel Penelitian Dan Keterkaitannya

### 2.2.1 Kualitas Regulasi

Menurut *World Bank*, Kualitas regulasi merupakan indikator yang mengukur persepsi terhadap kapasitas pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta regulasi yang efektif guna mendukung dan mendorong perkembangan sektor swasta. Kualitas regulasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan ekosistem digital dan sistem perpajakan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Indikator *Regulatory Quality* mengukur persepsi terhadap kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendorong perkembangan sektor swasta secara sehat dan efisien. Ukuran kualitas regulasi berupa nilai persentil dari angka 0 hingga 100 mencerminkan seberapa kondusif regulasi yang ada bagi iklim usaha dan penggunaan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk perpajakan (World Bank, 2025).

Sebagai variabel independen dalam penelitian, kualitas regulasi spending untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan kesiapan institusi negara dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor swasta, menjamin lingkungan bisnis yang sehat, persaingan yang adil, serta perlindungan hukum terhadap pelaku bisnis, serta ,engurangi hambatan administratif dan memperbaiki tata kelola regulasi sehingga investasi dan aktivitas ekonomi dapat berkembang Indikator kualitas regulasi mengacu pada beberapa aspek penting diantaranya:

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Kemampuan pemerintah merumuskan kebijakan yang efektif dalam sektor ekonomi
2. Konsistensi dan kejelasan regulasi sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha
3. Pembukaan akses pasar dan investasi untuk pelaku usaha, baik domestik maupun asing
4. Perlindungan terhadap hak-hak pelaku ekonomi, terutama dalam kegiatan bisnis dan investasi
5. Transparansi dan akuntabilitas proses regulasi

Indikator *Regulatory Quality* yang disusun oleh *World Governance Indicators* diukur berdasarkan data yang berasal dari lembaga dibawah ini:

1. *Economist Intelligence Unit* (EIU): Menilai praktik persaingan yang tidak adil, kontrol harga, tarif diskriminatif, perlindungan berlebihan, dan pajak diskriminatif.
2. *Global Competitiveness Report* (GCS): Mengukur beban regulasi pemerintah dan prevalensi hambatan non-tarif.
3. *Heritage Foundation* (HER): Menilai kebebasan investasi dan kebebasan finansial.
4. *International Property Development* (IPD): Mengukur kemudahan memulai bisnis, mendirikan anak perusahaan, dan keberadaan hambatan administrasi serta subsidi harga komoditas.
5. *Political Risk Services* (PRS): Menilai profil investasi dan hambatan terhadap pengembangan sektor swasta.
6. *World Market Observatory* (WMO): Mengukur beban regulasi dan ketidakkonsistenan pajak yang dapat mempengaruhi operasi bisnis dan meningkatkan biaya akibat ketidakjelasan regulasi atau birokrasi.

Sehingga Kualitas regulasi dapat diproksikan sebagai berikut:

$$\text{Kualitas Regulasi} = \text{Nilai Skor Regulatory dari WGI}$$

Nilai kualitas regulasi pada WGI diukur berupa persentil dalam rentang 0 (paling lemah) sampai 100 (paling kuat). Semakin tinggi nilai sebuah negara, semakin dianggap regulasi yang dimiliki kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan aktivitas bisnis. Sebaliknya, nilai rendah menunjukkan regulasi cenderung menghambat aktivitas ekonomi atau penuh hambatan birokrasi. Kualitas regulasi juga mencakup keberadaan insentif dan sanksi yang efektif untuk mendorong kepatuhan, serta harmonisasi regulasi lintas negara di kawasan ASEAN. Harmonisasi ini penting agar pelaku usaha lintas negara tidak mengalami kesulitan akibat perbedaan sistem dan aturan perpajakan. Seperti yang ditegaskan oleh Silalahi (2020), perumusan regulasi yang berkualitas tetap menjadi tantangan utama dalam menciptakan iklim hukum yang mendukung perkembangan teknologi dan sektor fiskal. Temuan yang dilakukan Prasetyanti, dkk (2023) menemukan bahwa kualitas regulasi tidak berpengaruh terhadap Realisasi penerimaan pajak. di Negara ASEAN hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas regulasi di sebagian besar negara ASEAN. Rahayu, dkk (2023) menyatakan bahwa Kualitas layanan dalam hal ini tidak berpengaruh terhadap rasio pajak, hal ini karena banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, sedangkan Marselina (2019) membuktikan adanya pengaruh signifikan antara kualitas regulasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi pajak terhadap PDB.

## **2.2.2 Kemapanan Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan prasarana baik fisik maupun non fisik, yang diperlukan untuk mendukung aktivitas suatu kawasan, industri, atau aktivitas perekonomian secara menyeluruh (Shobirin & Ali, 2019). Pembangunan infrastruktur adalah totalitas fasilitas dan fasilitas sosial yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan meningkatkan kualitas hidup warganya. Fasilitas ini meliputi fasilitas pendidikan yang memadai dan baik, ketersediaan air yang ditularkan melalui pipa, pusat perawatan kesehatan yang kualitatif dan sesuai, penyediaan jalan yang baik, guru yang layak dan berkualitas serta fasilitas pengajaran yang memadai (Oliver, Edeh, & Chukwuani, 2017). Infrastruktur terdiri dari layanan publik yang dimaksudkan untuk melayani masyarakat, termasuk

Muhamad Herdyansyah, 2025

*PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penyediaan hukum dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, listrik, sistem drainase (Ajiteru, Adaranijo, & Bakare, 2018).

Infrastruktur umumnya dipandang sebagai layanan publik penting dan mendasar yang harus ada jika kemajuan harus dibuat oleh negara-negara di dunia (Migap, 2014). infrastruktur sebagai elemen spesifik yang berfungsi sebagai katalis pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan warga (Oisasoje & Ojeifo, 2012). Dalam hal ini, Ketersediaan memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada pada masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam pengambilan kebijakan (Mongdong, Masinambow, & Tumangkeng, 2018).

Kemapanan infrastruktur dalam administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting, mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Salah satu yang paling fundamental adalah ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, yang meliputi aksesibilitas jaringan internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, perangkat lunak yang efektif, serta sistem informasi yang mampu mendukung kelancaran proses perpajakan. Ketersediaan ini memastikan bahwa wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara online, yang semakin mempermudah mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Namun, lebih dari sekadar ketersediaan, kualitas infrastruktur juga menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Keandalan, kecepatan, dan keamanan sistem Teknologi informasi yang digunakan dalam administrasi perpajakan menentukan apakah sistem tersebut dapat beroperasi secara efisien dan aman. Infrastruktur yang berkualitas tinggi akan memastikan bahwa seluruh proses perpajakan dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis, yang pada akhirnya meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wajib pajak.

Dalam penelitian ini Kemapanan infrastruktur diukur dengan menggunakan skor dari pilar Infrastruktur yang tersedia dalam *Statistical Performance Indicators* (SPI). *Statistical Performance Indicators* (SPI) mengukur kapasitas dan kematangan sistem statistik nasional dengan mengevaluasi penggunaan data, kualitas layanan, cakupan topik, sumber informasi, serta infrastruktur dan ketersediaan sumber daya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil

pembangunan dan memantau kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pilar Infrastruktur mencakup segmen infrastruktur keras dan lunak untuk menghasilkan sumber data, produk data, dan layanan data yang berguna. Sehingga kemapanan infrastruktur dapat diproksikan sebagai berikut:

$$\text{Kemapanan Infrastruktur} = \text{Skor Pilar Infrastruktur dalam SPI}$$

Studi yang dilakukan oleh Ramadhani & Faridatussalam (2024) menunjukkan bahwa infrastruktur telekomunikasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena akan meningkatkan akses masyarakat dan pelaku bisnis terhadap informasi yang lebih baik, yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis domestik dan asing serta mengubahnya menjadi kegiatan produktif dalam meningkatkan perekonomian bangsa.

### 2.2.3 Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data yang berkualitas, yakni informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan (Rohanang, et al., 2020). Dengan adanya teknologi khususnya dalam administrasi perpajakan menyebabkan terjadinya perubahan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia kini digantikan oleh tenaga mesin atau elektronik. Tujuan dari Penggunaan Teknologi Informasi yaitu untuk mengefisiensi waktu sehingga terdapat kesan baik dan memuaskan bagi wajib pajak (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Penggunaan Teknologi Informasi ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan.

Dalam penelitian ini, variabel penggunaan teknologi informasi diukur dengan menggunakan indikator yang dirumuskan oleh *International Telecommunication Union* (ITU), sebuah lembaga khusus di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki kewenangan dalam menetapkan standar dan mengelola isu-isu global terkait teknologi informasi dan komunikasi.

Muhamad Herdyansyah, 2025

**PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ITU menyediakan indikator yang komprehensif dan telah diakui secara internasional sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi di berbagai negara. Pengukuran penggunaan teknologi informasi pada level internasional umumnya mengacu pada indikator-indikator resmi yang diterbitkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU), sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang telekomunikasi. ITU menetapkan beberapa indikator utama untuk mengukur seberapa luas dan meratanya pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat (ITU, 2025). Tiga indikator pokok yang dijadikan rujukan adalah:

1. *Individuals using the Internet (% of population)* menunjukkan persentase penduduk di suatu negara yang telah menggunakan internet, baik untuk keperluan komunikasi, informasi, maupun transaksi. Indikator ini penting untuk menilai tingkat adopsi internet dan literasi digital di masyarakat.
2. *International internet bandwidth per user* mengukur kapasitas jaringan internasional yang tersedia bagi setiap pengguna internet. Angka ini mencerminkan kualitas serta kelancaran akses pengguna terhadap informasi dan layanan digital lintas negara, sekaligus sebagai cerminan kesiapan infrastruktur digital sebuah negara.
3. *Households with internet access at home* menyajikan proporsi rumah tangga yang memiliki sambungan internet di tempat tinggalnya. Indikator ini krusial karena akses internet di rumah mendorong konsistensi penggunaan untuk pendidikan, pekerjaan, hingga layanan pemerintah daring.

Dari penjelasan tersebut maka, penggunaan teknologi informasi dapat diproksikan sebagai berikut:

Penggunaan Teknologi Informasi = Rata-rata nilai *Individuals using the internet (% of population)*, *international internet bandwidth per user*, dan *households with internet acces at home* dari *International Telecommunication Union*

#### 2.2.4 Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Realisasi ini mencerminkan jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah dalam periode tertentu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Di negara-negara ASEAN, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam penelitian ini Realisasi penerimaan pajak diukur dengan rasio penerimaan pajak, atau yang sering disebut dengan *tax ratio*. Menurut Kagan (2023) *Tax ratio* merupakan adalah ukuran utama yang mencerminkan sejauh mana efektivitas pemerintah dalam mengumpulkan pajak sebagai bagian dari Produk Domestik Bruto (PDB). *Tax Ratio* digunakan untuk menilai seberapa efektif pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak relatif terhadap ukuran ekonominya. Kristanto & Chandrika (2023) menemukan bahwa Realisasi penerimaan pajak, tercermin dari potensi maksimum pendapatan pajak yang dapat dicapai suatu negara dibandingkan dengan penerimaan pajak aktual. Data dalam penelitian ini bersumber dari *Government Revenue Dataset* (GRD) yang dikembangkan oleh *International Center for Tax and Development* (ICTD). Dataset ini mencakup informasi mengenai penerimaan pajak, tingkat usaha pajak (*tax effort*), serta potensi penerimaan pajak. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 150 negara, dan disajikan dalam bentuk persentase pada skala 0 hingga 100 persen. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin mencerminkan bahwa suatu negara memiliki tingkat penerimaan pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, GRD juga menyediakan data komprehensif terkait pendapatan pemerintah, termasuk rincian komponen pajak, yang mencakup total 197 negara. Dataset ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pola dan tren penerimaan pajak baik di tingkat nasional, regional, maupun lintas negara sepanjang waktu.

*Tax ratio* suatu negara perlu tinggi untuk memastikan pemerintah dapat membiayai pengeluarannya. Selain itu, menurut Groww (2025) *tax ratio* membantu untuk menentukan status ekonomi suatu negara maju, berkembang atau

terbelakang. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan negara maju, sedangkan yang lebih rendah berarti negara sedang berkembang. Rasio ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mencerminkan kebijakan perpajakan dan kualitas tata kelola suatu negara. Menurut *World Bank*, *tax ratio* yang ideal berkisar antara 15-20% dari PDB agar suatu negara dapat memenuhi kebutuhan fiskalnya secara berkelanjutan (Siswanto, 2018). OECD mendefinisikan *tax ratio* sebagai persentase total penerimaan pajak terhadap PDB yang mencerminkan tingkat kontribusi wajib pajak dalam mendukung pembangunan nasional. *Tax ratio* yang rendah menunjukkan bahwa suatu negara memiliki keterbatasan dalam membiayai pengeluaran publik tanpa meningkatkan utang. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan *tax ratio* melalui reformasi kebijakan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan sistem administrasi perpajakan (Marselina, 2019). Selain itu, *tax ratio* yang tinggi dapat mendukung keberlanjutan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dalam jangka panjang (Lien, 2015).

Secara umum, rasio pajak dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Total Penerimaan Pajak}}{\text{Produk Domestik Bruto}} \times 100\%$$

## 2.2.5 Keterkaitan antar Variabel

### 2.2.5.1 Pengaruh Kualitas Regulasi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Kualitas regulasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas kebijakan perpajakan dan tingkat realisasi penerimaan pajak di suatu negara. Kualitas regulasi yang baik mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merancang, menerapkan, dan menegakkan kebijakan yang mendorong efisiensi pasar serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Namun, temuan empiris menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Prasetyanti dkk. (2023) menunjukkan bahwa kualitas regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di negara-negara ASEAN. Temuan ini bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa regulasi yang berkualitas mampu meningkatkan kepercayaan publik, sehingga dapat meningkatkan

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



penerimaan pajak. Rendahnya kualitas regulasi di sebagian besar negara ASEAN menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak. Penelitian Rahayu dkk.(2023) menemukan bahwa kualitas regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio penerimaan pajak. Marselina dan Santi (2019) menunjukkan bahwa kualitas regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak. Kualitas regulasi yang baik, khususnya dalam penyusunan kebijakan yang mendukung sektor swasta, dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperluas basis pajak, yang pada akhirnya mendorong penerimaan pajak. Penelitian Syadullah dan Wibowo (2015) menekankan bahwa beban regulasi yang berlebihan justru dapat memperbesar sektor informal dan menurunkan kinerja ekonomi, namun apabila diatur dengan baik, regulasi yang berkualitas mampu meningkatkan rasio pajak.

#### **2.2.5.2 Pengaruh Kemapanan Infrastruktur terhadap Realisasi Penerimaan Pajak**

Kemapanan infrastruktur merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas sistem perpajakan dan realisasi penerimaan pajak. Infrastruktur yang memadai, khususnya dalam sektor telekomunikasi dan transportasi digital, mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, mendorong aktivitas ekonomi, dan memperluas basis pajak. Penelitian Ramadhani dan Faridatussalam (2024) menunjukkan bahwa infrastruktur telekomunikasi di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang semakin baik memperluas akses informasi dan meningkatkan produktivitas bisnis, yang pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas dan meningkatkan potensi penerimaan pajak. Hasil serupa dinyatakan oleh Taufik dan Markhamah (2024) yang menemukan bahwa peningkatan infrastruktur berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi, tetapi juga meningkatkan efisiensi pelayanan publik, termasuk administrasi perpajakan. Studi yang dilakukan oleh Andriany dan Qibthiyyah (2018) menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur memiliki

Muhamad Herdyansyah, 2025

*PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengaruh positif terhadap peningkatan kapasitas pajak daerah. Infrastruktur yang memadai membuka akses ekonomi yang lebih luas, mendorong aktivitas sektor privat, dan memungkinkan pemerintah meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak.

### **2.2.5.3 Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak**

Penggunaan teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam penguatan sistem administrasi perpajakan modern. Teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi perpajakan yang akurat dan terkini. Penelitian Yunita (2025) menunjukkan bahwa ekonomi digital yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN+3. Teknologi informasi dan komunikasi dinilai mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mempercepat inovasi, dan menekan biaya produksi, sehingga mendorong aktivitas ekonomi yang pada akhirnya dapat memperluas basis penerimaan pajak. Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Siswanto (2024) menemukan bahwa penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di seluruh provinsi Indonesia pada 2017-2021. Penggunaan Teknologi Informasi menjadi faktor penentu perpajakan daerah di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Akbar dan Apollo (2020) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun informasi perpajakan yang berbasis digital telah tersedia secara luas, sebagian besar wajib pajak belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas teknologi tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan memerlukan dukungan dari sisi edukasi, kesadaran wajib pajak, dan penguatan sistem pengawasan agar efektivitasnya dapat tercapai. Penelitian Hartani dkk. (2020) menegaskan bahwa adopsi *e-government* dan teknologi informasi di negara-negara ASEAN-6 terbukti

Muhamad Herdyansyah, 2025

**PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mampu mengurangi tingkat korupsi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, yang secara tidak langsung mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan menurunnya korupsi, potensi kebocoran penerimaan pajak juga dapat ditekan, sehingga realisasi penerimaan pajak menjadi lebih optimal. Temuan ini mempertegas bahwa penggunaan teknologi informasi tidak hanya berkontribusi pada efisiensi administratif, tetapi juga pada perbaikan tata kelola perpajakan yang lebih transparan.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan kontribusi penting dalam membangun dasar teoritis dan empiris terkait Kualitas regulasi, kemapanan infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi terhadap realisasi penerimaan pajak. Penelitian Rizqiyanto (2025) dengan judul *Tax Regulation Challenges In The Digital Economy Era*. Menggunakan pendekatan eksploratif dalam penelitian hukum normatif yang fokus menganalisis regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia terkait ekonomi digital. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Data kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi perpajakan di Indonesia belum mampu mengakomodasi kompleksitas ekonomi digital karena definisi objek pajak yang belum jelas, sulitnya pelacakan transaksi lintas batas, dan lemahnya kerangka hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kehilangan penerimaan negara dan ketimpangan perlakuan pajak.

Penelitian Yunita (2025) yang berjudul *Efek Spasial Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kawasan di ASEAN+3*. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Ekonomi digital sebagai variabel independen, serta variabel kontrol yakni Moneter, Fiskal, Investasi & Employment. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel sebagai Teknik analisis data nya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi digital mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN+3

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian oleh Li, dkk (2024) yang berjudul *The Potential of Information Technology on Tax Voluntary Compliance* dengan Kepatuhan Pajak Sukarela sebagai Variabel Dependen dan Potensi Teknologi Informasi sebagai Variabel Independen. Penelitian menggunakan metode Konseptual berbasis teori *slippery slope framework & fairness theory*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Teknologi Informasi berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak sukarela dengan meningkatkan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak

Penelitian Ramadhani & Faridatussalam (2024) dengan judul Analisis Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 5 Negara ASEAN menggunakan pertumbuhan penduduk, pengguna internet, emisi CO<sub>2</sub>, dan infrastruktur telekomunikasi, sebagai Variabel independen serta Pertumbuhan ekonomi sebagai Variabel Dependen, Penelitian ini menggunakan data panel sebagai teknik analisis datanya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengguna internet menunjukkan hasil positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 Negara ASEAN tahun 2013-2022. Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, dan Vietnam menunjukkan hasil uji t-statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 Negara ASEAN tahun 2013-2022.

Penelitian Siswantoro (2024) yang berjudul Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah berfokus untuk menguji bagaimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memengaruhi penerimaan pajak daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen. Adapun variabel independennya adalah perkembangan TIK yang diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, serta keahlian TIK. Penelitian ini juga memasukkan kontrol atas perbedaan karakteristik daerah dengan menganalisis data panel dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2017–2022. Seluruh data dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia, dan teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan model regresi panel. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hanya dimensi penggunaan TIK yang

Muhamad Herdyansyah, 2025

**PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Sementara itu, dimensi akses dan infrastruktur TIK serta keahlian TIK tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian Talahaturusun & Kohardinata (2024) dengan judul *Impact of tax regulation on the development of financial technology in Indonesia*. Menggunakan Regulasi perpajakan sebagai variabel independen dan Perkembangan teknologi finansial sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei yang dianalisis dengan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan *fintech* di Indonesia.

Penelitian Taufik & Markhamah (2024) dengan judul *The Effect of Infrastructure Development On Economic Growth In Asean Countries: Dynamic Panel Data Analysis*. Penelitian ini menggunakan Pertumbuhan ekonomi sebagai Variabel Dependen serta *Unemployment*, inflasi, infrastruktur, FDI, dan GDP sebagai Variabel Independen Dalam penelitian Teknik analisis data menggunakan data Panel. Hasil penelitian menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN dalam jangka pendek. Inflasi, infrastruktur, dan investasi asing langsung juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Selain itu, Produk Domestik Bruto turut mendorong pertumbuhan ekonomi secara proporsional dalam jangka panjang.

Studi yang dilakukan oleh Djafri dkk. (2023) dengan judul *Utilization of Information and Communication Technology in the Tax Administration System to Increase Taxpayer Compliance*. Menggunakan Manajemen kinerja organisasi sebagai Variabel Dependen dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Independen. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan studi literatur. Hasil dari Penelitian ini menyoroti bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat meningkatkan efisiensi operasional, komunikasi, dan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi.

Studi oleh Prasetyanti, dkk (2023) dengan judul *The Effect of Government Effectiveness, Rule of Law, Control of Corruption, Regulatory Quality and e-Government on Tax Compliance (Empirical Study in ASEAN Countries)*. Penelitian ini menggunakan Kepatuhan Pajak sebagai variabel dependen. Efektivitas Pemerintah, *Rule of Law*, Kualitas Regulasi, Pengendalian korupsi, *e-Government* sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, kualitas regulasi, dan implementasi *e-government* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak di negara-negara ASEAN.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, dkk (2023) yang berjudul *The Influence of Governance, Economic Growth, and Foreign Direct Investment on Tax Ratios in Southeast Asian Countries*. Penelitian ini menggunakan Rasio Pajak sebagai variabel dependen. Serta Efektivitas Pemerintah, kualitas regulasi, Pertumbuhan ekonomi, FDI sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis Regresi Data Panel. Hasil dari Penelitian ini menemukan bahwa Efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan investasi asing langsung (FDI) memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio pajak di negara-negara Asia Tenggara. Kualitas regulasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayeni & Olarewajuafolabi (2020) dengan judul *Tax Revenue, Infrastructural Development and Economic Growth in Nigeria*. Dalam penelitian *invariable* yang digunakan yaitu *Tax Revenue, Infrastructure & Economic growth*. Penelitian ini menggunakan model *Vector Auto Regression* (VAR). Temuan empiris menunjukkan adanya hubungan kausal satu arah dari penerimaan pajak ke pertumbuhan ekonomi, serta dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan infrastruktur. Selain itu, ditemukan hubungan kausal dua arah antara penerimaan pajak dan pembangunan infrastruktur, yang berarti keduanya saling memengaruhi.

Studi yang dilakukan oleh Akbar & Apollo (2020) dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah) Variabel Dependen yang digunakan yaitu Kepatuhan Pajak Variabel Independen diantaranya Pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan fiskus. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Peningkatan dalam penggunaan teknologi informasi dan kualitas pelayanan fiskus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Hartani dkk. (2020) dengan judul *Reducing Corruption Through E-Government Adoption, Information And Communication Technology In Asean Countries*. Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ialah korupsi. Variabel independen yang digunakan diantaranya *e-Government* dan Teknologi Informasi, serta menggunakan PDB & Populasi sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan *e-Government* & Teknologi Informasi mampu menurunkan korupsi di ASEAN

Penelitian Mallick (2020) dengan judul *Do governance quality and ICT infrastructure influence the tax revenue mobilisation? An empirical analysis for India*. Dalam penelitian ini menggunakan Mobilisasi pendapatan pajak sebagai variabel dependen. Infrastruktur Teknologi Informasi ,Kualitas tata kelola pemerintahan sebagai variabel independen. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Infrastruktur Teknologi Informasi dan kualitas tata kelola tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan,

Studi yang dilakukan oleh Marselina & Santi (2019) dengan judul *The effect of tax ratio and good government governance on economic growth*. Efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, kepastian hukum, dan kontrol korupsi digunakan sebagai variabel independen. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan yakni regresi data panel. Temuan ini

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dan regulasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN

Penelitian yang dilakukan oleh Andriany & Qibthiyyah (2018) dengan judul Analisis Hubungan antara Infrastruktur Jalan dan *Tax Capacity*: Studi Kasus Indonesia. Menggunakan penerimaan pajak pusat & penerimaan PDRD sebagai variabel dependen. Infrastruktur jalan sebagai variabel independen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi untuk pajak daerah menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur dapat mendorong peningkatan tax capacity, baik pajak daerah provinsi maupun kabupaten.

Studi oleh Makmun Syadullah (2015) yang berjudul *Governance and Tax Revenue in Asean Countries*. Menggunakan rasio pajak sebagai variabel dependen. Indikator *Governance* sebagai variabel independen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Regresi Data Panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian korupsi, suara, dan akuntabilitas, dan stabilitas politik berpengaruh negatif terhadap rasio pajak, Supremasi hukum dan Kualitas regulasi berpengaruh positif terhadap rasio pajak. Dari penelitian-penelitian ini dapat disajikan sebagai tabel di bawah ini :



Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul / Peneliti / Tahun / Sumber                                                                                            | Metode Penelitian (Variabel dan Teknik Analisis)                                                                                                                                                                                                                                       | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Peneliti                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Tax Regulation Challenges In The Digital Economy Era / Rizqiyanto, dkk. / 2025 / Trunojoyo Law Review</i>                 | Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak menggunakan variabel kuantitatif namun fokus menganalisis regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia terkait ekonomi digital. Menggunakan pendekatan yuridis normatif Teknik Analisis Data: Menggunakan analisis kualitatif | Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi perpajakan di Indonesia belum mampu mengakomodasi kompleksitas ekonomi digital karena definisi objek pajak yang belum jelas, sulitnya pelacakan transaksi lintas batas, dan lemahnya kerangka hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kehilangan penerimaan negara dan ketimpangan perlakuan pajak. | Persamaan: Menekankan pentingnya regulasi<br>Perbedaan: hanya berfokus pada regulasi perpajakan                                                         |
| 2  | <i>Efek Spasial Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kawasan di ASEAN+3 / Yunita / 2025 / Jurnal Disrupsi Bisnis</i> | Variabel Dependen : Pertumbuhan ekonomi, Variabel Independen : Ekonomi digital, Variabel kontrol : Moneter, Fiskal, Investasi & Employment. Teknik analisis data dengan data panel                                                                                                     | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi digital mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN+3                                                                                                                                                                                                               | Persamaan : menggunakan data panel, dan fokus pada Kawasan ASEAN<br>Perbedaan : Tidak menggunakan variabel kualitas regulasi dan keamanan infrastruktur |

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

| No | Judul / Peneliti / Tahun / Sumber                                                                                                                                        | Metode Penelitian (Variabel dan Teknik Analisis)                                                                                                                                                                                                                                              | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Peneliti                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | <i>The Potential of Information Technology on Tax Voluntary Compliance / Li, dkk / 2024 / International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences</i> | Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Sukarela<br>Variabel Independen: Potensi Teknologi Informasi<br>Metode penelitian : Konseptual berbasis teori slippery slope framework & fairness theory<br>Teknik analisis data : Tidak menggunakan data empiris, penelitian menggunakan model konseptual | Penggunaan Teknologi Informasi berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak sukarela dengan meningkatkan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak                                                                                                                                                                      | Persamaan: Fokus pada teknologi informasi dan kepatuhan pajak;<br>Perbedaan: Tidak membahas infrastruktur atau regulasi                                   |
| 4  | Analisis Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 5 Negara ASEAN / Ramadhani & Faridatussalam / 2024 / Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan         | Variabel independen : pertumbuhan penduduk, pengguna internet, emisi CO2, dan infrastruktur telekomunikasi, Variabel Dependen : Pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis data menggunakan data panel                                                                                              | Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengguna internet menunjukkan hasil positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 Negara ASEAN tahun 2013-2022. Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, dan Vietnam menunjukkan hasil uji t-statistik berpengaruh positif dan | Persamaan : fokus pada Infrastruktur Kawasan ASEAN dan menggunakan data panel<br>Perbedaan : Tidak memasukkan variabel kualitas regulasi dalam penelitian |

Muhamad Herdyansyah, 2025

**PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

| No | Judul / Peneliti / Tahun / Sumber                                                                                                                                                                       | Metode Penelitian (Variabel dan Teknik Analisis)                                                                                                                                                     | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Peneliti                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 Negara ASEAN tahun 2013-2022                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 5  | <i>Impact of tax regulation on the development of financial technology in Indonesia / Talahaturusun &amp; Kohardinata / 2024 / Journal of Enterprise and Development (JED)</i>                          | Variabel X : Regulasi perpajakan<br>Variabel Y : Perkembangan teknologi finansial<br>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei yang dianalisis dengan regresi berganda. | Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan fintech di Indonesia                                                                                                                                                                                  | Persamaan : menekankan pentingnya regulasi terkait dengan pajak dan teknologi<br><br>Perbedaan : fokus pada regulasi terhadap perkembangan fintech di Indonesia. |
| 6  | <i>The Effect of Infrastructure Development On Economic Growth In Asean Countries: Dynamic Panel Data Analysis / Taufik &amp; Markhamah / 2024 / Nusantara Economics and Entrepreneurships Journals</i> | Variabel Dependen : Pertumbuhan ekonomi,<br>Variabel Independen : Unemployment, inflasi, infrastruktur, FDI, dan GDP<br>Teknik analisis data menggunakan data Panel                                  | Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN dalam jangka pendek. Inflasi, infrastruktur, dan investasi asing langsung juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Selain itu, Produk Domestik Bruto turut mendorong pertumbuhan | Persamaan : fokus pada Infrastruktur Kawasan ASEAN dan menggunakan data panel<br><br>Perbedaan : Tidak memasukkan variabel kualitas regulasi dalam penelitian    |

Muhamad Herdyansyah, 2025

**PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

| No | Judul / Peneliti / Tahun / Sumber                                                                                                                                                                                        | Metode Penelitian (Variabel dan Teknik Analisis)                                                                                                                    | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                            | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Peneliti                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     | ekonomi secara proporsional dalam jangka panjang.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |
| 7  | <i>Utilization of Information and Communication Technology in the Tax Administration System to Increase Taxpayer Compliance / Djafri dkk. / 2023 / Ilomata International Journal of Tax and Accounting</i>               | Variabel Dependen: Manajemen kinerja organisasi<br>Variabel Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi<br>Teknik: Deskriptif Kualitatif dengan studi literatur     | Penelitian ini menyoroti bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat meningkatkan efisiensi operasional, komunikasi, dan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi.                                               | Persamaan: menjadikan Teknologi Informasi & kepatuhan pajak sebagai variabel<br><br>Perbedaan: Tidak menjadikan regulasi/infrastruktur sebagai variabel |
| 8  | <i>The Effect of Government Effectiveness, Rule of Law, Kontrol of Corruption, Regulatory Quality and e-Government on Tax Compliance (Empirical Study in ASEAN Countries) Prasetyanti, dkk / 2023 / ICEBE Conference</i> | Dependen: Kepatuhan Pajak;<br>Independen: Efektivitas Pemerintah, Rule of Law, Kualitas Regulasi, Pengendalian korupsi e-Government;<br>Teknik: Analisis data panel | Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, kualitas regulasi, dan implementasi <i>e-government</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak di negara-negara ASEAN. | Persamaan: Kualitas regulasi dan kepatuhan sebagai variabel<br>Perbedaan: Tidak ada variabel mediasi                                                    |
| 9  | <i>The Influence of Governance, Economic Growth, and Foreign Direct Investment on Tax Ratios</i>                                                                                                                         | Variabel Dependen: Rasio Pajak<br>Variabel Independen: Efektivitas Pemerintah,                                                                                      | Penelitian ini menemukan bahwa Efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi, pertumbuhan                                                                                                                                                    | Persamaan: Fokus ASEAN & regulasi                                                                                                                       |

Muhamad Herdyansyah, 2025

**PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

| No | Judul / Peneliti / Tahun / Sumber                                                                                             | Metode Penelitian (Variabel dan Teknik Analisis)                                                                                                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Peneliti                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>in Southeast Asian Countries / Rahayu, dkk / 2023 / IJBAE</i>                                                              | kualitas regulasi, Pertumbuhan ekonomi, FDI<br>Teknik: Regresi Data Panel                                                                                 | ekonomi, dan investasi asing langsung (FDI) memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio pajak di negara-negara Asia Tenggara. Kualitas regulasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio pajak.                                                                                                               | Perbedaan: Tidak membahas penggunaan Teknologi Informasi                                                                                                  |
| 10 | <i>Tax Revenue, Infrastructural Development and Economic Growth in Nigeria / Ayeni &amp; Olarewajuafolabi / 2020 / IJMSIT</i> | Variabel penelitian ini : <i>Tax Revenue, Infrastructure &amp; Economic growth</i> . Penelitian ini menggunakan model <i>Vector Auto Regression (VAR)</i> | Temuan empiris menunjukkan adanya hubungan kausal satu arah dari penerimaan pajak ke pertumbuhan ekonomi, serta dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan infrastruktur. Selain itu, ditemukan hubungan kausal dua arah antara penerimaan pajak dan pembangunan infrastruktur, yang berarti keduanya saling memengaruhi. | Persamaan : fokus pada Infrastruktur Kawasan ASEAN dan menggunakan data panel<br>Perbedaan : Tidak memasukkan variabel kualitas regulasi dalam penelitian |
| 11 | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak                          | Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak<br>Variabel Independen: Pemanfaatan teknologi                                                                          | Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap tingkat                                                                                                                                                                                            | Persamaan: Sama-sama membahas Teknologi Informasi & kepatuhan pajak; Perbedaan: Tidak                                                                     |

Muhamad Herdyansyah, 2025

**PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

| No | Judul / Peneliti / Tahun / Sumber                                                                                                                                                                  | Metode Penelitian (Variabel dan Teknik Analisis)                                                                                                                                        | Hasil Penelitian                                                                                                                                    | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Peneliti                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah) / Akbar & Apollo / 2020 / Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi                                                                     | informasi dan pelayanan fiskus<br>Teknik: Regresi Linier Berganda (SPSS)                                                                                                                | kepatuhan wajib pajak. Peningkatan dalam penggunaan teknologi informasi dan kualitas pelayanan fiskus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.     | membahas regulasi & infrastruktur                                                                     |
| 12 | <i>Reducing Corruption Through E-Government Adoption, Information And Communication Technology In Asean Countries</i> / Hartani dkk. / 2020 / <i>Journal of Security and Sustainability Issues</i> | Variabel Dependen: Korupsi; Variabel Independen: <i>e-Government</i> , Teknologi Informasi; Variabel Kontrol: PDB & Populasi; Teknik: Analisis Data panel                               | Penggunaan <i>e-Government</i> & Teknologi Informasi menurunkan korupsi di ASEAN                                                                    | Persamaan: Penggunaan Teknologi Informasi di ASEAN<br>Perbedaan: Fokus korupsi, bukan kepatuhan pajak |
| 13 | <i>Do governance quality and ICT infrastructure influence the tax revenue mobilisation? An empirical analysis for India</i> / Mallick / 2020 / <i>Economic Change and Restructuring</i>            | Variabel Dependen: Mobilisasi pendapatan pajak<br>Variabel Independen: Infrastruktur Teknologi Informasi, Kualitas tata kelola pemerintahan<br>Teknik: Analisis regresi linier berganda | Infrastruktur Teknologi Informasi dan kualitas tata kelola tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan, | Persamaan: Regulasi & infrastruktur sebagai variabel<br><br>Perbedaan: tidak membahas kepatuhan pajak |
| 14 | <i>The effect of tax ratio and good government governance on</i>                                                                                                                                   | Variabel Independen : Efektivitas pemerintah,                                                                                                                                           | Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dan regulasi                                                                                    | Persamaan : Membahas kualitas regulasi di                                                             |

Muhamad Herdyansyah, 2025

**PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

| No | Judul / Peneliti / Tahun / Sumber                                                                                                                                         | Metode Penelitian (Variabel dan Teknik Analisis)                                                                                                     | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                               | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Peneliti                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>economic growth / Marselina &amp; Santi / 2019 / Opción</i>                                                                                                            | kualitas regulasi, kepastian hukum, dan kontrol korupsi. Variabel Dependen : Pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis data menggunakan data panel        | memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN                                                                                                                                                                     | Kawasan ASEAN dan menggunakan data panel<br>Perbedaan : Tidak memasukkan infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi                                               |
| 15 | <i>Analisis Hubungan antara Infrastruktur Jalan dan Tax Capacity: Studi Kasus Indonesia / Andriany &amp; Qibthiyyah / 2018 / Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia</i> | Variabel dependen : penerimaan pajak pusat & penerimaan PDRD. Variabel Independen : Infrastruktur jalan. Teknik analisis data menggunakan data panel | Hasil estimasi untuk pajak daerah menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur dapat mendorong peningkatan tax capacity, baik pajak daerah provinsi maupun kabupaten. Demikian juga halnya dengan faktor belanja pemerintah yang menunjukkan hubungan positif. | Persamaan : fokus pada Infrastruktur dan menggunakan data panel<br>Perbedaan : Tidak memasukkan variabel kualitas regulasi dalam penelitian. Lingkupnya hanya Indonesia |
| 16 | <i>Improving Domestic Revenue Mobilisation in African Countries Using ICT: A Literature Review Analysis / Emmanuel Eilu / 2017</i>                                        | <i>Literature Review</i> ; tidak eksplisit menyebut variabel                                                                                         | Teknologi Informasi berpotensi bantu mobilisasi pajak, namun mahal dan kompleks                                                                                                                                                                                | Persamaan: Teknologi Informasi & tantangan adopsi; Perbedaan: Tidak menggunakan regulasi dan kepatuhan pajak sebagai variabel                                           |

| No | Judul / Peneliti / Tahun / Sumber                                              | Metode Penelitian (Variabel dan Teknik Analisis)                                                        | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Peneliti                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <i>Governance and Tax Revenue in Asean Countries / Makmun Syadullah / 2015</i> | Variabel Dependen: Rasio Pajak; Variabel Independen: Indikator Governance<br>Teknik: Regresi Data Panel | Pengendalian korupsi, suara, dan akuntabilitas, dan stabilitas politik berpengaruh negatif terhadap rasio pajak, Supremasi hukum dan Kualitas regulasi berpengaruh positif terhadap rasio pajak | Persamaan: Fokus ASEAN & kualitas regulasi; Perbedaan: membahas Teknologi Informasi & infrastruktur |

Muhamad Herdyansyah, 2025

*PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*research framework*), merupakan panduan esensial untuk sebuah penelitian yang berperan sebagai panduan komprehensif yang mencerminkan teori yang relevan untuk hipotesis penelitian, serta memberikan kerangka kerja yang merinci, pertimbangan filosofis, epistemologis, metodologis, dan analitis bagi peneliti (Iba & Wardhana, 2023). Realisasi penerimaan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan di suatu negara. Dalam konteks negara-negara ASEAN, realisasi penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya kualitas regulasi, keamanan infrastruktur, dan penggunaan teknologi informasi. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kepatuhan dan perilaku wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh kendali perilaku yang dirasakan, yang dalam konteks ini berkaitan dengan kemudahan akses regulasi dan sistem perpajakan yang memadai. Selain itu, *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) menjelaskan bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi perpajakan dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitasi, termasuk infrastruktur dan kebijakan yang menunjang. *Compliance Theory* juga menekankan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan, efektivitas, dan kemudahan sistem perpajakan yang diatur oleh regulasi yang berkualitas.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh kualitas regulasi terhadap penerimaan pajak. Penelitian Marselina dan Santi (2019) serta Syadullah dan Wibowo (2015) menunjukkan bahwa kualitas regulasi yang baik justru mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak, khususnya ketika kebijakan yang dibuat mendukung sektor swasta dan mampu menekan sektor informal.

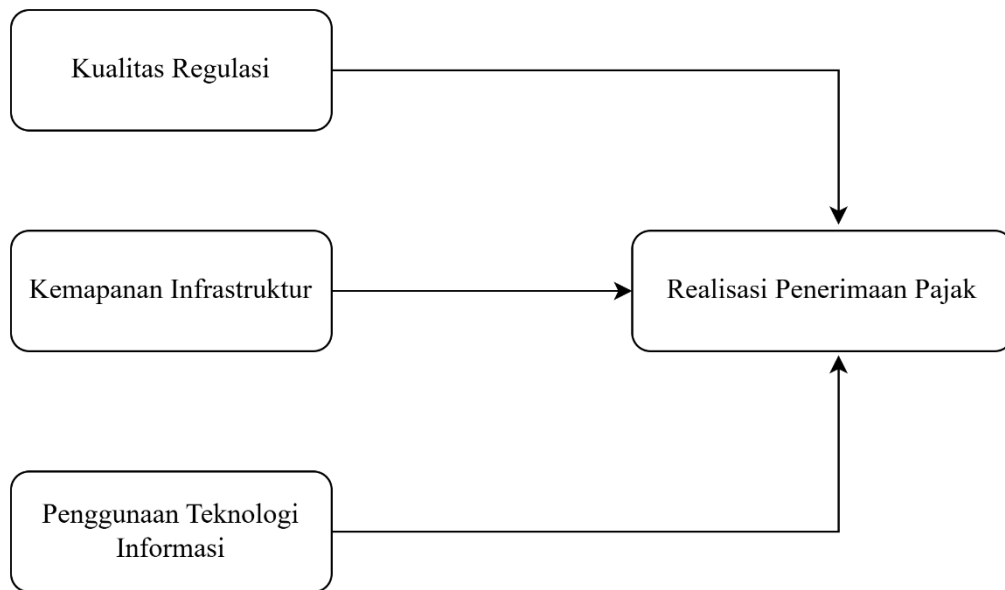
Selain regulasi, keamanan infrastruktur juga memegang peran penting dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Ramadhani dan Faridatussalam (2024) serta Taufik dan Markhamah (2024) menegaskan bahwa infrastruktur, khususnya telekomunikasi, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-

negara ASEAN. Infrastruktur yang memadai memperluas akses informasi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mendorong aktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan potensi penerimaan pajak. Andriany dan Qibthiyyah (2018) menemukan bahwa ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan kapasitas pajak daerah, sementara penelitian Ayeni dkk. (2020) mengungkapkan adanya hubungan timbal balik antara penerimaan pajak dan pembangunan infrastruktur, di mana infrastruktur yang baik dapat meningkatkan penerimaan pajak, serta penerimaan pajak yang meningkat memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Penelitian Yunita (2025) menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas basis penerimaan pajak melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Siswantoro (2024) menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi & komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di seluruh provinsi Indonesia selama tahun 2017-2021. Hartani dkk. (2020) membuktikan bahwa adopsi *e-government* dan TIK dapat meningkatkan transparansi, menekan korupsi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Berdasarkan paparan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dengan asumsi bahwa kualitas regulasi, kemapanan infrastruktur, dan penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh penting terhadap realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN. Kualitas regulasi yang baik, didukung oleh infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang terintegrasi, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, memperluas basis perpajakan, dan pada akhirnya mendorong optimalisasi penerimaan pajak di kawasan ASEAN.

Dengan demikian, maka dapat dibuat suatu gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2021) Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang bersumber dari teori yang relevan dan perlu divalidasi melalui analisis data empiris. Adapun hipotesis dalam penelitian ini meliputi:

1. Kualitas regulasi berpengaruh signifikan terhadap Realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN
2. Kemapanan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN
3. Penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap Realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN
4. Kualitas regulasi, kemapanan infrastruktur, dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap Realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN